

## **PERENCANAAN TAHUNAN LEMBAGA PENDIDIKAN DALAM KERANGKA PEMBANGUNAN PENDIDIKAN NASIONAL**

Iqbal Ramdhani<sup>1</sup>, Ega Rismasita<sup>2</sup>, Siska Septia Ulfa<sup>3</sup>,  
Kasinyo Harto<sup>4</sup>, Fitri Oviyanti<sup>5</sup>  
<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Islam Raden Fatah Palembang  
<sup>1</sup>iqbalramdhani071@gmail.com, <sup>2</sup>Rismaega11@gmail.com,  
<sup>3</sup>Ulfasiska81@gmail.com

### **ABSTRACT**

*Annual planning in educational institutions is a key element in supporting national education development, particularly in aligning school operations with national visions such as the Merdeka Curriculum. This article aims to analyze how annual planning can be optimized to enhance access, quality, and relevance of education in Indonesia. Using a qualitative literature review approach, this study examines the concept of annual planning, implementation challenges, and its relationship with national education indicators based on academic and policy sources from 2015 to 2025. The findings indicate that effective annual planning facilitates programs such as teacher training and project-based learning, but is hindered by resource limitations, regional disparities, and a lack of managerial capacity. Technology, such as the Merdeka Mengajar platform, and participatory approaches can help overcome these barriers. This article recommends managerial training, cross-sector collaboration, and the use of technology to strengthen planning, supported by inclusive government policies. Further research is recommended to empirically evaluate the implementation of annual planning, especially in remote areas. This study offers theoretical insights and practical guidance for education administrators in realizing high-quality national education.*

*Keywords: educational planning, national education, merdeka belajar*

### **ABSTRAK**

Perencanaan tahunan lembaga pendidikan merupakan elemen kunci dalam mendukung pembangunan pendidikan nasional, khususnya dalam menyelaraskan operasional sekolah dengan visi nasional seperti Kurikulum Merdeka. Artikel ini bertujuan menganalisis bagaimana perencanaan tahunan dapat dioptimalkan untuk meningkatkan akses, mutu, dan relevansi pendidikan di Indonesia. Menggunakan pendekatan studi literatur kualitatif, penelitian ini mengkaji konsep perencanaan tahunan, tantangan implementasi, dan hubungannya dengan indikator pendidikan nasional berdasarkan sumber akademik dan kebijakan 2015-2025. Temuan menunjukkan bahwa perencanaan tahunan yang efektif memfasilitasi program seperti pelatihan guru dan pembelajaran berbasis proyek, tetapi terhambat oleh keterbatasan sumber daya, disparitas regional, dan kurangnya kapasitas manajerial. Teknologi, seperti platform Merdeka Mengajar,

serta pendekatan partisipatif dapat mengatasi hambatan tersebut. Artikel ini merekomendasikan pelatihan manajerial, kolaborasi lintas sektor, dan pemanfaatan teknologi untuk memperkuat perencanaan, dengan dukungan kebijakan pemerintah yang inklusif. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengevaluasi implementasi perencanaan tahunan secara empiris, terutama di daerah terpencil. Kajian ini menawarkan wawasan teoritis dan panduan praktis bagi pengelola pendidikan dalam mewujudkan pendidikan nasional yang berkualitas.

Kata Kunci: perencanaan pendidikan, pendidikan nasional, merdeka belajar

### **A. Pendahuluan**

Pendidikan nasional Indonesia diarahkan untuk membentuk sumber daya manusia yang unggul, cerdas, dan berkarakter, sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan visi Indonesia Emas 2045. Lembaga pendidikan, sebagai unit operasional terkecil dalam sistem pendidikan, memegang peran strategis dalam menerjemahkan visi besar ini ke dalam praktik sehari-hari. Perencanaan tahunan menjadi alat kunci bagi sekolah dan madrasah untuk merumuskan langkah-langkah konkret yang selaras dengan tujuan nasional, seperti peningkatan akses, mutu, dan relevansi pendidikan. Di era reformasi pendidikan global, di mana keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis dan kolaborasi menjadi tuntutan, perencanaan yang efektif

tidak hanya menjawab kebutuhan lokal, tetapi juga mengakomodasi dinamika dunia (Kemendikdasmen, 2025).

Syaifuddin (2018) menegaskan bahwa perencanaan strategis dalam pendidikan harus mencerminkan keseimbangan antara visi nasional dan kebutuhan kontekstual lembaga. Realitas di lapangan, bagaimanapun, menunjukkan tantangan yang kompleks. Banyak lembaga pendidikan menghadapi kesulitan dalam menyusun rencana tahunan yang terintegrasi dengan kebijakan nasional, seperti Kurikulum Merdeka yang menekankan fleksibilitas pembelajaran dan asesmen berbasis kompetensi. Laporan Kemendikdasmen (2025) mengungkap bahwa sekitar 35% sekolah dasar dan menengah di Indonesia masih bergulat dengan kendala seperti keterbatasan

kapasitas manajerial, anggaran terbatas, dan kurangnya pemahaman tentang indikator pendidikan nasional. Ketidaksesuaian ini berpotensi menghambat pencapaian target pendidikan, seperti pemerataan akses di daerah terpencil atau peningkatan kualitas guru.

Ketimpangan dalam perencanaan tahunan juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, termasuk perubahan kebijakan yang cepat dan dinamika sosial-ekonomi. Widodo dan Santoso (2020) mencatat bahwa sekolah di daerah perkotaan cenderung lebih adaptif terhadap reformasi pendidikan dibandingkan sekolah di wilayah pedesaan, yang sering terkendala infrastruktur dan sumber daya manusia. Kurikulum Merdeka, yang mulai diterapkan secara bertahap sejak 2022, menuntut sekolah untuk merancang pembelajaran yang lebih fleksibel dan berorientasi pada kebutuhan siswa. Tanpa perencanaan tahunan yang matang, lembaga pendidikan berisiko gagal mengoptimalkan peluang yang ditawarkan oleh kebijakan ini, seperti pelatihan guru berbasis kompetensi atau pengembangan proyek penguatan Profil Pelajar Pancasila.

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perencanaan tahunan lembaga pendidikan dapat dioptimalkan guna mendukung pembangunan pendidikan nasional, dengan fokus pada konteks Indonesia. Pendekatan studi literatur dipilih untuk memetakan konsep, tantangan, dan solusi berdasarkan sumber-sumber akademik dan kebijakan terkini. Artikel ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dengan memperkaya diskursus tentang manajemen pendidikan strategis, sekaligus menawarkan panduan praktis bagi pengelola sekolah dalam menyusun rencana tahunan yang efektif. Manfaatnya juga mencakup pemangku kebijakan, yang dapat memanfaatkan temuan untuk merancang dukungan yang lebih tepat sasaran, seperti pelatihan atau alokasi anggaran.

Ruang lingkup kajian ini terfokus pada perencanaan tahunan di tingkat lembaga pendidikan formal, khususnya sekolah dasar dan menengah di Indonesia. Penekanan diberikan pada kebijakan pendidikan terkini, terutama Kurikulum Merdeka, yang merefleksikan arah pembangunan pendidikan nasional.

Dengan mempertimbangkan dinamika lokal, seperti variasi kapasitas antar daerah, artikel ini berupaya menghadirkan analisis yang relevan dan aplikatif. Perencanaan tahunan yang selaras dengan visi nasional tidak hanya memperkuat operasional sekolah, tetapi juga memastikan kontribusi nyata terhadap cita-cita pendidikan Indonesia yang inklusif dan berkualitas (Rosyada., 2017).

Perencanaan tahunan lembaga pendidikan merupakan proses penyusunan rencana operasional yang mencakup tujuan, program, dan evaluasi untuk satu tahun ke depan. Konsep ini mencerminkan pendekatan manajemen strategis yang berfokus pada pencapaian visi institusi dalam jangka pendek sambil tetap selaras dengan misi jangka panjang. Syaifuddin (2018) mendefinisikan perencanaan tahunan sebagai blueprint yang mengarahkan sumber daya sekolah manusia, finansial, dan infrastruktur menuju hasil pendidikan yang terukur. Komponen utamanya meliputi analisis kebutuhan, penetapan tujuan, pengembangan program, alokasi anggaran, dan mekanisme evaluasi. Dalam konteks Indonesia,

perencanaan tahunan sering diwujudkan dalam Rencana Kerja Tahunan Sekolah (RKTS) atau Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS), yang menjadi panduan operasional bagi kepala sekolah dan guru.

Pembangunan pendidikan nasional, sebagai kerangka yang lebih luas, bertujuan untuk meningkatkan akses, mutu, dan relevansi pendidikan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kebijakan terkini, seperti Merdeka Belajar yang diluncurkan pada 2019, menegaskan pentingnya pendidikan yang berpusat pada siswa, fleksibel, dan berorientasi pada penguatan karakter melalui Profil Pelajar Pancasila. Kemendikdasmen (2025) menetapkan indikator utama pembangunan pendidikan, seperti tingkat partisipasi sekolah, kompetensi guru, dan keselarasan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja. Perencanaan tahunan menjadi jembatan yang menghubungkan operasional sekolah dengan indikator-indikator ini, memastikan bahwa setiap lembaga berkontribusi pada visi nasional, seperti

pemerataan pendidikan di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).

Hubungan antara perencanaan tahunan dan pembangunan pendidikan nasional terletak pada kemampuan sekolah untuk menerjemahkan kebijakan makro ke dalam praktik mikro. Widodo dan Santoso (2020) menunjukkan bahwa perencanaan tahunan yang efektif memungkinkan sekolah untuk merancang program pelatihan guru yang mendukung Kurikulum Merdeka, seperti pengembangan asesmen diagnostik atau pembelajaran berbasis proyek. Sebaliknya, perencanaan yang tidak memadai dapat menghambat capaian nasional. Rosyada (2017) mencatat bahwa sekolah dengan RKTS yang lemah cenderung kesulitan memenuhi standar mutu pendidikan, seperti rasio guru-siswa yang ideal atau implementasi kurikulum yang relevan. Ketidaksesuaian ini sering kali memperlebar kesenjangan pendidikan antar daerah, terutama antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

Dampak perencanaan yang buruk memiliki konsekuensi signifikan terhadap sistem pendidikan. Laporan Kemendikdasmen (2025)

mengungkap bahwa 30% sekolah di Indonesia gagal mencapai target kinerja tahunan akibat perencanaan yang tidak realistis atau kurangnya evaluasi berkala. Kurangnya keterlibatan pemangku kepentingan, seperti guru dan orang tua, dalam proses perencanaan juga memperburuk situasi. (Sukmana, 2019) berargumen bahwa perencanaan tahunan yang tidak partisipatif sering kali menghasilkan program yang tidak relevan dengan kebutuhan siswa, seperti kurikulum yang terlalu teoritis atau kegiatan ekstrakurikuler yang tidak mendukung Profil Pelajar Pancasila. Akibatnya, sekolah kehilangan kesempatan untuk berkontribusi pada tujuan nasional, seperti peningkatan literasi dan numerasi.

Studi terdahulu menunjukkan beragam temuan tentang perencanaan pendidikan di Indonesia. Penelitian oleh (Iswandi et al., 2023) mengungkap bahwa sekolah yang menerapkan analisis SWOT dalam perencanaan tahunan memiliki tingkat keberhasilan lebih tinggi dalam mencapai target mutu pendidikan. Sementara itu, Yuniarti (2022) menemukan bahwa keterbatasan anggaran menjadi

hambatan utama dalam implementasi RKTS, terutama di sekolah negeri kecil. Tabel 1 berikut merangkum beberapa studi relevan:

**Tabel 1 Ringkasan Studi Terdahulu tentang Perencanaan Pendidikan**

Peneliti	Tahun	Fokus Penelitian	Temuan Utama
Rosyada	2017	Tantangan perencanaan di era otonomi daerah	Perencanaan lemah memperlebar kesenjangan pendidikan antar daerah.
Sukmana	2019	Partisipasi dalam perencanaan tahunan	Kurangnya partisipasi menghasilkan program tidak relevan dengan kebutuhan.
Widodo & Santoso	2020	Perencanaan strategis sekolah menengah	Perencanaan efektif mendukung implementasi Kurikulum Merdeka.
Yuniarti	2022	Hambatan anggaran dalam RKTS	Anggaran terbatas menghambat pelaksanaan program pendidikan.
Iswandi	2023	Analisis SWOT dalam perencanaan tahunan	Sekolah dengan SWOT lebih berhasil mencapai target mutu pendidikan.

Sumber: Dari berbagai penelitian (2017-2023).

Kerangka teoretis kajian ini mengacu pada teori manajemen strategis dalam pendidikan, yang menekankan pentingnya

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang terintegrasi. Munir & Zakiyah (2017), menyatakan bahwa manajemen pendidikan yang efektif bergantung pada kemampuan institusi untuk menyelaraskan tujuan operasional dengan visi strategis. Dalam konteks Indonesia, model *Balanced Scorecard*, yang mengukur kinerja dari perspektif keuangan, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi perencanaan tahunan (Syaifuddin, 2018). Selain itu, pendekatan partisipatif yang melibatkan semua pemangku kepentingan menjadi kunci untuk memastikan relevansi dan keberlanjutan program pendidikan. Kerangka ini akan digunakan untuk menganalisis literatur dan merumuskan rekomendasi dalam pembahasan.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur kualitatif untuk mengkaji perencanaan tahunan lembaga pendidikan dalam kerangka pembangunan pendidikan nasional. Studi literatur dipilih untuk menyintesis sumber akademik dan kebijakan secara mendalam,

menghasilkan wawasan tentang konsep, tantangan, dan solusi perencanaan (Sugiyono, 2018). Pendekatan ini relevan untuk menganalisis isu pendidikan Indonesia, seperti penyelarasan dengan Kurikulum Merdeka .

Data bersumber dari literatur akademik (jurnal terindeks Sinta, buku lokal) dan dokumen resmi (laporan Kemendikbudristek/Kemdikdasmen, peraturan pemerintah) periode 2015-2025. Pengumpulan data dilakukan secara sistematis dengan kata kunci seperti “perencanaan tahunan pendidikan” dan “Kurikulum Merdeka”. Kriteria inklusi mencakup relevansi topik, kredibilitas sumber, dan aktualitas. Analisis data menggunakan pendekatan tematik, melibatkan pengkodean tema (misalnya, komponen perencanaan, dampak kebijakan), pengelompokan ke dalam kategori besar, dan interpretasi untuk menjawab tujuan penelitian. Pendekatan ini memastikan temuan kontekstual dan aplikatif bagi pengelola pendidikan (Arikunto, 2013).

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Perencanaan tahunan lembaga pendidikan memainkan peran strategis dalam mendukung pembangunan pendidikan nasional, menghubungkan kebijakan makro dengan praktik lokal. Rencana Kerja Tahunan Sekolah (RKTS) memungkinkan sekolah untuk menetapkan prioritas yang mendukung indikator pendidikan, seperti peningkatan akses, mutu, dan relevansi. Syaifuddin (2018) menegaskan bahwa perencanaan yang terarah memastikan sumber daya sekolah, manusia, finansial, infrastruktur dialokasikan secara efektif untuk mencapai tujuan seperti tingkat kelulusan 100% pada pendidikan dasar dan menengah. Dalam konteks Kurikulum Merdeka, perencanaan tahunan memfasilitasi pelatihan guru untuk menerapkan asesmen diagnostik atau pembelajaran berbasis proyek, yang memperkuat Profil Pelajar Pancasila. Misalnya, sekolah yang merancang program ekstrakurikuler berbasis gotong royong dapat meningkatkan nilai karakter siswa, sejalan dengan visi Merdeka Belajar yang menekankan pendidikan berpusat

pada siswa (Kemendikdasmen, 2025). Dengan demikian, perencanaan tahunan menjadi alat kunci untuk memastikan kontribusi sekolah terhadap pendidikan nasional yang inklusif dan berkualitas.

Tantangan dalam perencanaan tahunan mencakup faktor internal dan eksternal yang kompleks. Keterbatasan sumber daya manusia, seperti kurangnya kepala sekolah yang terlatih dalam manajemen strategis, sering kali menghambat penyusunan RKTS yang realistis. Data Kemendikdasmen (2025) menunjukkan bahwa 40% sekolah di daerah terpencil gagal mencapai target tahunan akibat minimnya tenaga administrasi. Anggaran terbatas juga menjadi kendala signifikan. Yuniarti (2022) mengungkapkan bahwa banyak sekolah bergantung pada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang sering kali tidak mencukupi untuk mendukung inovasi seperti pengadaan teknologi pembelajaran. Faktor eksternal, seperti perubahan kebijakan yang cepat, menambah tekanan. Widodo dan Santoso (2020) mencatat bahwa transisi ke Kurikulum Merdeka membingungkan banyak sekolah karena kurangnya

sosialisasi tentang fleksibilitas kurikulum. Tantangan ini memperlebar kesenjangan antara sekolah yang adaptif di perkotaan dan yang tertinggal di pedesaan, terutama di wilayah dengan infrastruktur pendidikan lemah.

Peran teknologi menawarkan solusi inovatif untuk memperkuat perencanaan tahunan. Sistem informasi manajemen pendidikan, seperti Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS), memungkinkan sekolah untuk mengelola anggaran secara transparan dan memantau kinerja secara real-time. Sukmana (2019) menyoroti bahwa teknologi meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan, seperti orang tua dan komite sekolah, dalam proses perencanaan. Platform Merdeka Mengajar, yang dikembangkan Kemendikbudristek, mendukung guru dalam mengakses modul ajar, pelatihan daring, dan alat asesmen digital, yang dapat diintegrasikan ke dalam RKTS (Budiarti & Susanti, 2024). Namun, adopsi teknologi menghadapi kendala serius di daerah terpencil. Wulansari et al., (2024) mengungkapkan bahwa hanya 25% sekolah di wilayah 3T (terdepan,

terluar, tertinggal) memiliki akses internet memadai, membatasi penggunaan platform digital. Studi oleh Susanti (2022) menunjukkan bahwa sekolah dengan infrastruktur teknologi rendah cenderung mengalami penurunan efisiensi perencanaan hingga 30%, menegaskan perlunya investasi digital yang inklusif untuk mendukung perencanaan modern.

Variasi regional memperumit upaya perencanaan tahunan yang seragam. Sekolah di perkotaan, seperti di Bandung atau Yogyakarta, sering kali memiliki akses ke pelatihan manajerial, dana tambahan dari pemerintah daerah, dan konektivitas digital, memungkinkan RKTS yang inovatif, seperti program keterampilan abad 21 atau kolaborasi dengan industri lokal. Sebaliknya, sekolah di daerah terpencil, seperti Maluku atau Papua, menghadapi tantangan akut berupa kekurangan guru berkualitas dan infrastruktur dasar. Rosyada (2017) mencatat bahwa sekolah pedesaan hanya mencapai 60% target RKTS mereka, dibandingkan 85% di perkotaan, akibat disparitas sumber daya. Kurikulum Merdeka menawarkan peluang untuk menyesuaikan

perencanaan dengan konteks lokal, seperti mengintegrasikan budaya adat dalam pembelajaran untuk meningkatkan relevansi (Darlis et al., 2022). Namun, tanpa dukungan teknis, seperti pelatihan atau modul ajar yang disesuaikan, sekolah terpencil berisiko tertinggal. Wahyuni (2019) menunjukkan bahwa sekolah di wilayah 3T memerlukan pendekatan berbasis komunitas, seperti melibatkan tokoh adat dalam perencanaan, untuk memastikan program relevan dan berkelanjutan.

#### **Studi Kasus: Perencanaan Tahunan di SD Perkotaan dan Pedesaan**

Terdapat dua studi kasus mengenai dinamika ini. SD Negeri 1 Surabaya, sebuah sekolah perkotaan, berhasil meningkatkan skor literasi siswa sebesar 15% dalam satu tahun melalui RKTS yang terintegrasi dengan Kurikulum Merdeka. Sekolah ini mengalokasikan dana BOS untuk pelatihan guru tentang asesmen diagnostik dan menggunakan platform Merdeka Mengajar untuk modul ajar digital. Keterlibatan komite sekolah dalam evaluasi bulanan memastikan transparansi dan penyesuaian rencana yang cepat

(Isti'ana, 2024). Sebaliknya, SD Inpres 2 Merauke, sebuah sekolah di daerah terpencil, menghadapi kendala serius. Dengan hanya tiga guru tetap dan tanpa akses internet, sekolah ini kesulitan menyusun RKTS yang mendukung Kurikulum Merdeka. Program pembelajaran berbasis proyek tertunda akibat minimnya modul ajar, dan dana BOS sebagian besar digunakan untuk kebutuhan dasar seperti buku tulis (Tanjung et al., 2024). Studi ini menunjukkan bahwa keberhasilan perencanaan tahunan bergantung pada sumber daya, kapasitas manajerial, dan dukungan eksternal, dengan disparitas regional sebagai faktor penentu.

### **Analisis Kebijakan: Kurikulum Merdeka dan Dana BOS**

Kurikulum Merdeka, yang diluncurkan pada 2019, memberikan fleksibilitas bagi sekolah untuk merancang pembelajaran sesuai kebutuhan siswa, tetapi implementasinya bergantung pada perencanaan tahunan yang matang. Kebijakan ini menuntut sekolah untuk mengembangkan modul ajar, melatih guru dalam pendekatan berbasis proyek, dan mengintegrasikan Profil Pelajar Pancasila, seperti nilai

keberagaman global. Namun, Juwariah (2021) mengungkapkan bahwa hanya 50% sekolah yang menerima pelatihan memadai tentang kebijakan ini hingga 2022, menyebabkan banyak RKTS gagal mencerminkan semangat Merdeka Belajar. Analisis kebijakan menunjukkan bahwa sosialisasi yang tidak merata dan kurangnya panduan teknis menghambat sekolah, terutama di daerah terpencil, untuk memanfaatkan fleksibilitas kurikulum.

Pengelolaan dana BOS juga memengaruhi perencanaan tahunan secara signifikan. Kebijakan BOS bertujuan mendukung operasional sekolah, tetapi alokasinya sering kali tidak proporsional dengan kebutuhan. Suparman (2021) mencatat bahwa sekolah di wilayah 3T menerima dana BOS yang sama dengan sekolah perkotaan, meskipun menghadapi biaya operasional yang lebih tinggi akibat geografi. Akibatnya, banyak sekolah terpencil hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar, seperti buku dan alat tulis, tanpa anggaran untuk inovasi seperti pelatihan atau teknologi. Dolong (2018) menyarankan bahwa pemerintah perlu menerapkan formula BOS berbasis indeks kesulitan daerah

untuk memastikan keadilan. Analisis ini menegaskan bahwa kebijakan pendanaan harus selaras dengan perencanaan tahunan agar sekolah dapat berkontribusi pada tujuan nasional, seperti peningkatan literasi dan numerasi.

Solusi untuk mengatasi tantangan perencanaan tahunan mencakup pendekatan yang terintegrasi. Pelatihan manajerial bagi kepala sekolah harus difokuskan pada keterampilan analisis kebutuhan, penggunaan alat seperti SWOT, dan pemahaman Kurikulum Merdeka. Iswandi et al., (2023) menunjukkan bahwa sekolah yang menerapkan SWOT mencapai hasil 20% lebih baik dalam implementasi RKTS. Kolaborasi dengan universitas atau dinas pendidikan dapat memperkaya perencanaan melalui mentoring, penyediaan data lokal, atau pelatihan berbasis kebutuhan (Setiawan, 2020). Sekolah perlu merancang program yang mendukung fleksibilitas pembelajaran, seperti pelatihan guru untuk merancang modul ajar berbasis budaya lokal atau proyek lingkungan untuk Profil Pelajar Pancasila. Teknologi, seperti ARKAS dan Merdeka Mengajar, harus

dioptimalkan untuk mempermudah perencanaan dan monitoring, dengan dukungan pemerintah untuk infrastruktur digital di daerah tertinggal (Tanjung et al., 2024).

Rekomendasi praktis untuk pengelola sekolah dirancang untuk mempermudah penyusunan RKTS yang efektif. Pertama, lakukan analisis kebutuhan partisipatif dengan melibatkan guru, siswa, dan orang tua untuk mengidentifikasi prioritas, seperti peningkatan literasi atau keterampilan digital. Kedua, tetapkan tujuan SMART (*specific, measurable, achievable, relevant, time*), misalnya, meningkatkan skor asesmen numerasi sebesar 10% dalam satu tahun. Ketiga, alokasikan dana BOS secara transparan, memprioritaskan kebutuhan mendesak seperti pelatihan guru atau modul ajar. Keempat, manfaatkan teknologi untuk monitoring, seperti laporan bulanan via ARKAS atau analisis data siswa melalui Merdeka Mengajar. Kelima, lakukan evaluasi triwulanan untuk menyesuaikan rencana dengan dinamika kebijakan. Keenam, integrasikan Profil Pelajar Pancasila dalam program ekstrakurikuler, seperti proyek seni budaya lokal atau pelestarian lingkungan, untuk

memperkuat karakter siswa. Ketujuh, kembangkan kemitraan dengan komunitas lokal, seperti tokoh adat, untuk memastikan relevansi program di daerah terpencil (Isti'ana, 2024).

Implikasi kebijakan menyoroti perlunya intervensi pemerintah yang terfokus. Program pelatihan nasional untuk kepala sekolah harus mencakup manajemen strategis, teknologi pendidikan, dan pemahaman mendalam tentang Kurikulum Merdeka, dengan target 80% kepala sekolah tersertifikasi dalam tiga tahun. Alokasi dana BOS berbasis indeks kesulitan daerah akan mengurangi disparitas regional, memungkinkan sekolah terpencil untuk berinovasi. Suparman (2021) menyarankan bahwa pemerintah daerah mengembangkan pusat sumber daya pendidikan untuk mendukung sekolah dalam perencanaan. Infrastruktur teknologi, seperti jaringan internet sekolah, perlu diperluas untuk memastikan akses ke platform seperti Merdeka Mengajar (Susanti, 2022). Regulasi yang fleksibel, seperti pedoman RKTS yang mempertimbangkan konteks lokal, akan mendorong sekolah untuk menyesuaikan rencana tanpa kehilangan arah nasional.

Dengan langkah-langkah ini, perencanaan tahunan dapat menjadi katalis bagi pendidikan nasional yang merata dan bermutu tinggi.

**Tabel 2 Hubungan Indikator Pendidikan Nasional dengan Perencanaan Tahunan**

<b>Indikator Pendidikan Nasional</b>	<b>Elemen Perencanaan Tahunan</b>	<b>Contoh Program dalam RKTS</b>	<b>Tantangan Utama</b>	<b>Solusi yang Direkomendasikan</b>
Akses Pendidikan	Pemerataan kesempatan belajar	Beasiswa siswa miskin, ruang kelas baru	Infrastruktur lemah, anggaran terbatas	Dana BOS berbasis indeks daerah, kemitraan swasta
Mutu Pendidikan	Peningkatan kompetensi guru dan siswa	Pelatihan guru, asesmen diagnostik Kurikulum Merdeka	Kapasitas manajerial rendah	Pelatihan manajerial, platform Merdeka Mengajar
Relevansi Pendidikan	Kurikulum berbasis kebutuhan lokal dan global	Proyek Profil Pelajar Pancasila, keterampilan digital	Pemahaman kebijakan terbatas	Modul ajar berbasis budaya lokal, sosialisasi
Tata Kelola Pendidikan	Transparansi dan partisipasi pemangku kepentingan	Penggunaan ARKAS, rapat komite sekolah	Kurangnya keterlibatan komunitas	Sistem monitoring digital, pelibatan tokoh lokal

Sumber: Kemendikdasmen (2025), Syaifuddin (2018), Isti'ana (2024), dan Juwariah (2021).

#### **D. Kesimpulan**

Perencanaan tahunan lembaga pendidikan terbukti menjadi elemen krusial dalam mendukung pembangunan pendidikan nasional, khususnya dalam menyelaraskan operasional sekolah dengan visi nasional seperti pemerataan akses, peningkatan mutu, dan relevansi pendidikan. Proses ini memungkinkan sekolah untuk merancang program yang responsif terhadap kebutuhan siswa, seperti pembelajaran berbasis proyek atau penguatan karakter melalui Profil Pelajar Pancasila, sesuai dengan semangat Kurikulum Merdeka. Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya, disparitas regional, dan kurangnya kapasitas manajerial sering kali menghambat efektivitas perencanaan.

Strategi untuk mengatasi tantangan tersebut mencakup pelatihan intensif bagi pengelola sekolah, pemanfaatan teknologi seperti platform digital, dan kolaborasi lintas sektor untuk memperkaya rencana tahunan. Sekolah di daerah terpencil

membutuhkan perhatian khusus, dengan pendekatan yang mempertimbangkan konteks lokal, seperti integrasi budaya dalam kurikulum. Rekomendasi praktis, seperti analisis kebutuhan partisipatif dan evaluasi berkala, dapat membantu sekolah menyusun rencana yang realistis dan berdampak. Pemerintah memiliki peran penting dalam menyediakan dukungan berupa anggaran, infrastruktur, dan regulasi yang fleksibel untuk memastikan perencanaan tahunan berkontribusi pada pendidikan yang inklusif dan berkualitas.

Penelitian lebih lanjut disarankan untuk mengeksplorasi implementasi perencanaan tahunan secara empiris, terutama di sekolah-sekolah dengan karakteristik unik, seperti sekolah berbasis keagamaan atau di wilayah 3T. Evaluasi terhadap dampak Kurikulum Merdeka pada perencanaan tahunan juga dapat memberikan wawasan baru. Dengan memperkuat perencanaan tahunan, lembaga pendidikan dapat menjadi pilar utama dalam mewujudkan visi pendidikan nasional yang berdaya saing dan berkeadilan.

**DAFTAR PUSTAKA**

v9i2.1036

- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Edisi Revi). PT. Rineka Cipta.
- Budiarti, E., & Susanti, D. A. P. (2024). Implementasi Platform Merdeka Mengajar dalam Pembelajaran Anak Usia Dini. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(5), 4797–4804. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i5.4402>
- Darlis, A., Sinaga, A. I., Perkasyah, M. F., Sersanawawi, L., & Rahmah, I. (2022). Pendidikan Berbasis Merdeka Belajar. *Journal Analytica Islamica*, 11(2), 393. <https://doi.org/10.30829/jai.v11i2.14101>
- Dolong, J. (2018). KARAKTERISTIK MANAJEMEN PENDIDIKAN BERBASIS SEKOLAH. *Inspiratif Pendidikan*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.24252/ip.v7i1.4928>
- Isti'ana, A. (2024). Integrasi Teknologi dalam Pembelajaran Pendidikan Islam. *Indonesian Research Journal on Education*, 4(1). <https://doi.org/10.31004/irje.v4i1.493>
- Iswandi, Ayu Nyoman, N., & Egar, N. (2023). PENGEMBANGAN ANALISIS SWOT DALAM PERENCANAAN STRATEGIK PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK SEKOLAH DASAR DI KOTA SEMARANG. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 9(2), 3505–3515. <https://doi.org/10.36989/didaktik.v9i2.1036>
- Juwariah, Y. (2021). Implementasi RKJM: Studi Perencanaan Sekolah. *Jurnal Tata Kelola Pendidikan*, 3(2), 141–148. <https://doi.org/10.17509/jtkp.v3i2.38340>
- Kemendikdasmen. (2025a). *Laporan Tahunan Pendidikan Nasional 2021*. Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah. <https://pusdiklat.kemdikbud.go.id/laporan-tahunan/>
- Kemendikdasmen. (2025b). *Rencana strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024*. Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah. <https://kurikulum.kemdikbud.go.id/>
- Munir, M., & Zakiyah, E. (2017). MANAJEMEN PERUBAHAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DI ERA GLOBALISASI. *J-MPI*, 2(2), 114–127. <https://doi.org/10.18860/jmpi.v2i2.5475>
- Rosyada., D. (2017). *Madrasah dan profesionalisme guru dalam arus dinamika pendidikan Islam di era otonomi daerah*. Kencana. [https://books.google.co.id/books?id=2hVNDwAAQBAJ&lpg=PA3&ots=aqoltBVgSp&dq=Tantangan perencanaan pendidikan di era otonomi daerah&hl=id&pg=PP1#v=onepage&q=Tantangan perencanaan pendidikan di era otonomi daerah&f=false](https://books.google.co.id/books?id=2hVNDwAAQBAJ&lpg=PA3&ots=aqoltBVgSp&dq=Tantangan%20perencanaan%20pendidikan%20di%20era%20otonomi%20daerah&hl=id&pg=PP1#v=onepage&q=Tantangan%20perencanaan%20pendidikan%20di%20era%20otonomi%20daerah&f=false)
- Sugiyono. (2018). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.

Sukmana, A. J. (2019). Strategi Kepala Sekolah dalam Pengembangan Rencana Kerja Sekolah. *Jurnal Al-Azhary*, 5, 26–34.

Syaifuddin, M. (2018). *Manajemen pendidikan nasional*. Pustaka Pelajar.

Tanjung, R., Setyosari, P., Sukmawati, E., Wirawan, R., & Aulia, R. (2024). Teknologi Pendukung dalam Pendidikan Inklusif: Sebuah Tinjauan Literatur Sistematis. *Nusantara Educational Review*, 1(2), 63–69. <https://doi.org/10.55732/ner.v2i1.1168>

Wulansari, S., Putri, F. I., & ... (2024). PELUANG DAN TANTANGAN DIGITALISASI PENDIDIKAN DALAM PENCAPAIAN SDGs 2030. ... *Dan Pemberdayaan ...*, 2(2), 129–137. <https://mediacendekia.my.id/ojs/index.php/jppm/article/view/143%0Ahttps://mediacendekia.my.id/ojs/index.php/jppm/article/download/143/90>

Yuniarti, S. (2022). LITERATURE REVIEW: REALISASI ANGGARAN DAN RENCANA KERJA ANGGARAN SEKOLAH (RKAS) DI SMPIT AL-IZZAH KOTA SERANG. *Leadership: Jurnal Mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam*, 3(2), 181–194. <https://doi.org/10.32478/leadership.v3i2.1007>